



PERJANJIAN KERJASAMA  
ANTARA  
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN KARANGANYAR  
dan  
RUMAH SAKIT PKU MUHAMMADIYAH SURAKARTA

NOMOR : 473.3/1503.13/VII/2023

NOMOR : **3190** /Sekr/RS PKU/VII/2023

TENTANG

PELAYANAN TERPADU DOKUMEN KEPENDUDUKAN SECARA *ONLINE*  
BAGI PASIEN YANG BERSALIN DI RUMAH SAKIT PKU MUHAMMADIYAH SURAKARTA  
PENDUDUK KABUPATEN KARANGANYAR

Pada hari ini senin tanggal dua puluh empat bulan juli tahun dua ribu dua puluh tiga, bertempat di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karanganyar, kami yang bertanda tangan di bawah ini masing-masing :

- I. JUNAIDI PURWANTO, S.H., M.M. : Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karanganyar, berkedudukan di Jalan Kaptan Mulyadi Cangakan Karanganyar Telepon (0271) 495035, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karanganyar, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KESATU;
- II. dr. MARDIATMO, Sp.Rad. : Direktur Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Surakarta, berkedudukan di Jalan Ronggowarsito No. 130 Timuran Banjarsari Surakarta Telepon (0271) 714578, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Surakarta, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA yang selanjutnya secara bersama-sama dalam Perjanjian Kerjasama ini disebut PARA PIHAK, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

1. bahwa PIHAK KESATU adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karanganyar sebagai instansi pelaksana yang bertanggungjawab dan berwenang melaksanakan pelayanan dalam urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
2. bahwa PIHAK KEDUA adalah Rumah Sakit berkedudukan di Jalan Ronggowarsito No. 130 Timuran Banjarsari Surakarta yang berwenang melaksanakan pelayanan Kesehatan dan melaksanakan verifikasi dan validasi data pasien yang bersalin di Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Surakarta Penduduk Kabupaten Karanganyar.

Paraf Pihak Kesatu	
Paraf Pihak Kedua	

Dengan memperhatikan ketentuan Peraturan Perundang-undangan sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 262, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah lain dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 1 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2011 Nomor 1), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 12 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 1 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2014 Nomor 12);
7. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 4 Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2019 Nomor 4), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 82 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2019 Nomor 82).

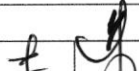
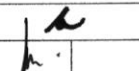


PARA PIHAK sepakat membuat Perjanjian Kerjasama tentang pelayanan terpadu dokumen kependudukan secara *online* bagi pasien yang bersalin di Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Surakarta Penduduk Kabupaten Karanganyar dengan ketentuan sebagai berikut :

## BAB I PENGERTIAN Pasal 1

- (1) Dokumen Kependudukan adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh Dinas yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti autentik yang dihasilkan dari pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.
- (2) Pencatatan Sipil adalah pencatatan Peristiwa Penting yang dialami oleh seseorang dalam register Pencatatan Sipil pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota atau Unit Pelaksana Teknis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
- (3) Kartu Keluarga yang selanjutnya disingkat KK adalah kartu identitas keluarga yang memuat data tentang nama, susunan dan hubungan dalam keluarga serta identitas anggota keluarga.
- (4) Kartu Identitas Anak yang selanjutnya disingkat KIA adalah identitas resmi anak sebagai bukti diri anak yang berusia kurang dari 17 (tujuh belas) tahun dan belum menikah yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota atau Unit Pelaksana Teknis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

## BAB II MAKSUD DAN TUJUAN Pasal 2

- (1) Maksud Perjanjian Kerjasama ini adalah untuk mengefektifkan fungsi dan peran PARA PIHAK melalui kerjasama pelayanan terpadu dokumen kependudukan secara *online*.
- (2) Tujuan Kerjasama ini adalah untuk meningkatkan pelayanan prima kepada masyarakat melalui pelayanan terpadu dokumen kependudukan secara *online*.

Paraf Pihak Kesatu		
Paraf Pihak Kedua		

**BAB III  
PRINSIP KERJASAMA  
Pasal 3**

Kerjasama ini didasarkan atas saling membantu, mengisi, melengkapi dan saling keterkaitan satu sama lain untuk kepuasan masyarakat.

**BAB IV  
RUANG LINGKUP  
Pasal 4**

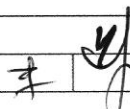
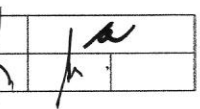
- (1) Ruang lingkup Kerjasama meliputi pelayanan terpadu dokumen kependudukan secara *online* berupa penerbitan Kutipan Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga; dan
- (2) Sasaran utama dan wilayah operasional kerjasama pelayanan terpadu secara *online* adalah pasien yang bersalin di Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Surakarta Penduduk Kabupaten Karanganyar.

**BAB V  
KEWAJIBAN PARA PIHAK  
Pasal 5**

- (1) PIHAK KESATU mempunyai kewajiban untuk :
  - a. memberikan *password* aplikasi pendaftaran *online* kepada PIHAK KEDUA;
  - b. memverifikasi data dan dokumen ajuan penerbitan Kutipan Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga yang dikirim secara *online* oleh PIHAK KEDUA;
  - c. menerbitkan Kutipan Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga bagi pasien yang bersalin di RS PKU Muhammadiyah Surakarta Penduduk Kabupaten Karanganyar;
  - d. mengirimkan *QRCode* untuk cetak mandiri Kutipan Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga melalui *email* PIHAK KEDUA; dan
  - e. memberikan bimbingan teknis terkait tatacara pendaftaran *online* dan informasi mengenai pelayanan dokumen kependudukan.
- (2) PIHAK KEDUA mempunyai kewajiban untuk :
  - a. menyerahkan Surat Pernyataan Operator kepada PIHAK KESATU;
  - b. menerbitkan Surat Keterangan Kelahiran;
  - c. mengupload berkas persyaratan penerbitan Kutipan Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga yang terdiri dari Surat Keterangan Kelahiran asli, Surat Nikah/Akta Perkawinan asli, Formulir 2.01 asli, fotocopi Kartu Keluarga, fotocopi KTP orangtua bayi, dan fotocopi KTP 2 (dua) orang saksi;
  - d. mendaftarkan secara *online* penerbitan Kutipan Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga melalui aplikasi PIHAK KESATU;
  - e. mencetak dan menyerahkan dokumen Kutipan Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga yang baru kepada pasien beserta *file pdf* nya.
  - f. menghimbau kepada pasien agar mengurus Kartu Identitas Anak di Kecamatan;
  - g. membantu mensosialisasikan program kerjasama pelayanan terpadu dokumen kependudukan secara *online* melalui media *online* PIHAK KEDUA; dan
  - h. menjaga kerahasiaan data dan dokumen kependudukan.

**BAB VI  
HAK PARA PIHAK  
Pasal 6**

- (1) PIHAK KESATU mempunyai hak untuk :
  - a. menerima Surat Pernyataan Operator dari PIHAK KEDUA;
  - b. menerima data dan dokumen persyaratan penerbitan Kutipan Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga yang dikirim PIHAK KEDUA secara *online*; dan
  - c. menolak permohonan PIHAK KEDUA apabila data dan dokumen persyaratan yang diajukan tidak lengkap dan/atau tidak benar.

Paraf Pihak Kesatu	
Paraf Pihak Kedua	

- (2) PIHAK KEDUA mempunyai hak untuk :
- menerima *password* dari PIHAK KESATU yang pengelolaannya menjadi tanggungjawab PIHAK KEDUA;
  - menerima *QRCode* yang dikirim melalui *email* untuk cetak mandiri Kutipan Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga dari PIHAK KESATU; dan
  - menerima bimbingan teknis terkait tatacara pendaftaran *online* dan informasi mengenai pelayanan dokumen kependudukan.

**BAB VII**  
**JAM KERJA PELAYANAN**  
Pasal 7

Jam kerja pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karanganyar diatur sebagai berikut :

- Senin – Kamis : pukul 08.00 s/d 15.00 WIB
- Jum'at : pukul 08.00 s/d 11.00 WIB
- Sabtu – Minggu : libur

**BAB VIII**  
**JANGKA WAKTU PERJANJIAN KERJASAMA**  
Pasal 8

- Perjanjian Kerjasama ini mulai berlaku selama 1 (satu) tahun sejak ditandatanganinya Perjanjian Kerjasama ini oleh PARA PIHAK, yaitu dari tanggal 24 Juli 2023 sampai dengan tanggal 24 Juli 2024; dan
- Apabila PIHAK KESATU menginginkan perpanjangan Kerjasama maka mengajukan surat tertulis kepada PIHAK KEDUA 3 (tiga) bulan sebelum periode Perjanjian Kerjasama berakhir.

**BAB IX**  
**BERAKHIRNYA PERJANJIAN KERJASAMA**  
Pasal 9

Perjanjian Kerjasama ini berakhir apabila :



- Jangka waktu Perjanjian Kerjasama telah berakhir dan/atau atas kesepakatan PARA PIHAK untuk mengakhiri Kerjasama sebelum jangka waktu Perjanjian Kerjasama ini berakhir; dan
- Adanya perubahan terhadap kelembagaan PIHAK KEDUA, sehingga perlu pembaharuan Perjanjian Kerjasama ini.

**BAB X**  
**KEADAAN MEMAKSA (*FORCE MAJEURE*)**  
Pasal 10

- Apabila terjadi hal-hal diluar kekuasaan PARA PIHAK atau keadaan memaksa, dapat dilakukan perubahan pelaksanaan Perjanjian Kerjasama atas persetujuan PARA PIHAK; dan
- Keadaan memaksa sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), adalah adanya kebijakan pemerintah yang mengakibatkan tidak dapat dilanjutkannya pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini dan apabila terjadi hal-hal di luar kekuasaan PARA PIHAK.

**BAB XI**  
**PENYELESAIAN PERSELISIHAN**  
Pasal 11

- Apabila dikemudian hari timbul permasalahan dalam perbedaan penafsiran dan pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini antara PARA PIHAK akan diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat; dan
- Dalam hal musyawarah dan mufakat sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) tidak tercapai, maka akan diselesaikan di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surakarta.

Paraf Pihak Kesatu	
Paraf Pihak Kedua	



BAB XII  
EVALUASI DAN PELAPORAN  
Pasal 12

- (1) PIHAK KEDUA berkewajiban membuat laporan kelahiran secara berkala setiap akhir tahun kepada PIHAK KESATU;
- (2) PIHAK KESATU melakukan evaluasi atas laporan dari PIHAK KEDUA sebagaimana dimaksud pada Ayat (1);
- (3) PIHAK KESATU dapat melaksanakan evaluasi pelaksanaan Perjanjian Kerjasama sewaktu-waktu; dan
- (4) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) dilaporkan oleh PIHAK KESATU kepada Bupati Karanganyar.

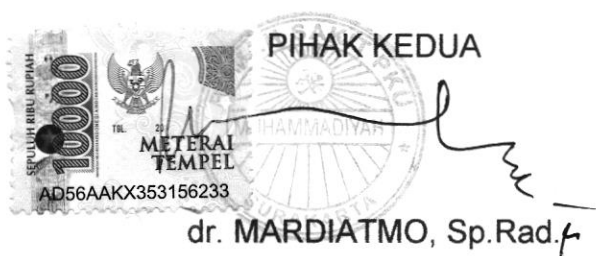
BAB XIII  
LAIN-LAIN  
Pasal 13

- (1) Dalam hal diperlukan adanya penambahan dan/atau pengurangan materi Perjanjian Kerjasama ini, dapat dilakukan perubahan atas persetujuan PARA PIHAK yang dituangkan dalam *Addendum* yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerjasama ini; dan
- (2) Ketentuan yang bersifat teknis dan operasional dalam pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini mengacu kepada Petunjuk Teknis yang disepakati oleh PARA PIHAK dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerjasama ini.

BAB XIV  
PENUTUP  
Pasal 14

Demikian Perjanjian Kerjasama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua), masing-masing sama aslinya yang dibubuhi materai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani PARA PIHAK dengan distempel resmi.

PIHAK KEDUA

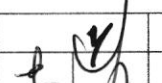
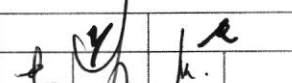


dr. MARDIATMO, Sp.Rad.f

PIHAK KESATU



JUNAIDY PURWANTO, S.H., M.M.

Paraf Pihak Kesatu	
Paraf Pihak Kedua	



**PIMPINAN DAERAH MUHAMMADIYAH  
KOTA SURAKARTA  
RS PKU MUHAMMADIYAH SURAKARTA**

Jl. Ronggowarsito No.130 Surakarta 57131 Jawa Tengah 0271-714578 / Fax. 0271-726359

www.rspkusolo.com | E-mail: Sekr@rspkusolo.com | : rspkusolo

f: Rumah Sakit PKU Solo @: @rspkusolo : pkusolo : rspkusolo



★★★★★  
**PARIPURNA**  
LEMBAGA AKREDITASI  
RUMAH SAKIT INDONESIA

**SURAT PERNYATAAN**

Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Aries Widiyoko,A.Md.PK  
NIK : 3501032101810001  
Instansi : Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Surakarta  
Jabatan : Admin Paklay Komplit Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Surakarta

Sebagai Admin Paklay Komplit dan bertugas memberikan pelayanan pendaftaran online dokumen kependudukan, dengan ini saya menyatakan bahwa :

1. Tidak akan menyalahgunakan data dan dokumen kependudukan.
2. Tidak akan menyalahgunakan Password yang diberikan.
3. Berkomitmen mencegah pungutan liar dan calo.
4. Tidak akan memungut biaya apapun dalam pelayanan dokumen kependudukan.
5. Tidak akan melayani pendaftaran dokumen kependudukan yang tidak lahir di RS PKU Muhammadiyah Surakarta dan/ atau diluar kewenangan yang diberikan oleh Disdukcapil Karanganyar.

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya dan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Mengetahui  
Direktur  
Rumah Sakit  
PKU Muhammadiyah Surakarta



dr. MARDIATMO, Sp.Rad.

Surakarta, 24 Juli 2023  
Yang Membuat Pernyataan

Aries Widiyoko,AMd.PK

PROVINSI JAWA TENGAH  
KABUPATEN SUKOHARJO

NIK : 3501032101810001

Nama : ARIES WIDIYOKO  
Tempat/Tgl Lahir : PACITAN, 21-01-1981  
Jenis Kelamin : LAKI-LAKI Gol. Darah :  
Alamat : CEMANI  
RT/RW : 007/013  
Kel/Desa : CEMANI  
Kecamatan : GROGOL  
Agama : ISLAM  
Status Perkawinan: KAWIN  
Pekerjaan : WIRASWASTA  
Kewarganegaraan: WNI  
Berlaku Hingga : SEUMUR HIDUP



SUKOHARJO  
31-12-2017

*[Handwritten signature]*